

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (TLHP BPK RI) di Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka tahun 2019-2021 maka dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan hasil analisis upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dalam meningkatkan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - a. Menghimbau kepada PEMDA untuk segera menindaklanjuti temuan dari BPK.
 - b. Mengundang OPD terkait dalam hal terkait temuan.
 - c. Memonitor sejauh mana Pelaksanaan Tindaklanjuti Yang Dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait temuan..
 - d. Membentuk tim majelis Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
 - e. Memberikan penegasan dalam pelaksanaan TLHP kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 - f. Menetapkan temuan yang terbukti menimbulkan kerugian daerah melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh kepala daerah sebagai kerugian daerah.

3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan tim majelis TPTGR dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan bimbingan teknis terkait penanganan tindak lanjut..
4. Pemerintah Daerah harus segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK ditahun-tahun sebelumnya atas temuan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan ketidakefektifan Sistem Pengendalian Intern agar tidak menghambat proses penyelesaian LHP di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- AICPA. (199). *Condification Of Auditing Standars And Procedures*, New York : AICPA
- AICPA. (1998). *Condification Of Auditing Standars And Procedures*, New York : AICPA
- Ahmad Rifai, Agus Harinurhady; Alansyah. (2017). *Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat*. Sumbawa Barat.
- Arens;Loebbecke. (1993). *Auditing: Pendekatan Terpadu* . Jakarta: Salemba Empat.
- Arief Atmaja, RM Syah dan Probohudono, Agung Nur. (2015). *Analisis Audit BPK RI terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakepatuhan dan kerugian Negara*.
- Bastian, indra. (2007). *Audit Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, indra. (2014). *Audit Sektor Publik Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPK – RI. (2018). *Ikhtisar Hasil Pemantuan Tindak Lanjut Semester I 2018*, Kupang. <http://bpk.go.id/tlrhp#>
- BPK – RI. (2019). *Ikhtisar Hasil Pemantuan Tindak Lanjut Semester I 2019*, Kupang. <http://bpk.go.id/tlrhp#>
- BPK - RI, (2020). *Ikhtisar Hasil Pemantuan Tindak Lanjut Semester I 2020*, Kupang. <http://bpk.go.id/tlrhp#>
- Halim, Abdul. (2008). *Auditing: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan UPP STIMYKPN*. Jogyakarta.
- Indonesia. (2003). *Undang-undang No. 17 Tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286. Jakarta.
- Indonesia. (2004). *Undang-undang No. 1 Tentang Perbendaharaan Negara*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355. Jakarta.
- Indonesia. (2008). *Undang-undang Nomor 12 Tentang Otonomi Daerah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.
- Indonesia. (2015). *Undang-undang Nomor 9 Tentang Pemerintah Daerah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.
- Indonesia. (2006). *Undang-undang Nomor 15 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.

- Indonesia. (2004). *Undang-undang Nomor 15 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.
- Indonesia. (2004). *Undang-undang Nomor 15 Tentang Pemerintah Daerah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.
- Muh, As'ad Pratama Putera. (2019) *Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit BPK Pada Instansi Pemerintah*. Makasar.
- Rahmawati, Imelda Dian; Arista D. (2013). *Pengaruh Tindak Lanjut Temuan Audit Fungsi Pemasaran Terhadap Minat Konsumen Penggunaan Kereta Api Eksekutif PT. KAI*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 24 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan*. Jakarta.
- Sisilia Amelia Essing, David P.E. Saerang (2015). <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Analisis Tindak Lanjut Hasil Audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet